

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SAROLANGUN

Syaparuddin

syappelawan@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Kampus Pinang Masak Jl. Jambi-Muara Bulian Mendalo - Darat Jambi 36361

Abstrak

Kemiskinan pada suatu wilayah pada dasarnya merupakan refleksi dari keterbatasan dan ketidakmampuan warga masyarakat atau penduduk pada suatu wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sekalipun pada tingkatan standar. Hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yakni kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, social dan kultur. kemiskinan di Kabupaten Sarolangun memerlukan sebuah program pengentasan kemiskinan yang lebih menitikberatkan kepada proses dan mengusahakan agar *outcome* pengentasan kemiskinan merupakan fokus dari program pengentasan kemiskinan sehingga tidak hanya melihat dari jumlah angka kemiskinan yang berkurang tetapi juga melihat bagaimana penduduk miskin tidak kembali menjadi miskin

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan besar bagi Indonesia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Mengingat masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah mendasar, maka penanggulangan kemiskinan yang *holistic* memerlukan keterlibatan semua unsur termasuk peran Pemerintah Daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat melalui perluasan peran dan ruang dialog yang *reciprocal* dengan menggalang kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Masalah kemiskinan diyakini karena pudarnya rasa kepedulian, keberpihakan serta kebersamaan di kalangan masyarakat

maupun dilingkungan para pengambil keputusan.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, juga menghadapi fenomena yang sama yang terkait dengan kemiskinan. Perkembangan pembangunan Kabupaten Sarolangun sampai saat ini telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan dan telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Secara makro, perekonomian Kabupaten Sarolangun juga tumbuh dengan baik. Selama periode 2008 – 2011, pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sebesar 6,24 persen tahun 2008, 5,14% tahun 2009 dan 6,05% tahun 2010. Namun demikian, di sisi lain jumlah penduduk miskin di daerah ini juga relatif tinggi. Jika tahun 2009 jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sebanyak 22.770 jiwa, hingga tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sebanyak 24.600 jiwa atau terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.830 jiwa. Kondisi demikian menempatkan Kabupaten Sarolangun pada urutan ke lima terbanyak jumlah penduduk miskinnya di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Tanjung Jabung Timur.

Kemiskinan pada suatu wilayah pada dasarnya merupakan refleksi dari keterbatasan dan ketidakmampuan warga masyarakat atau penduduk pada suatu wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sekalipun pada tingkatan standar. Ketidakmampuan ini akan memunculkan fenomena ketidakberdayaan yang pada gilirannya akan memperkuat stigma tentang munculnya keterbelakangan dan ketergantungan. Fenomena ini juga akan menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi-budaya lainnya yang berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian tentang strategi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya sejalan dengan tujuan pembangunan **MILENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)**, dengan tujuan dan sasaran **MDGs** yang menggambarkan bidang analisis kondisi kemiskinan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun yang sejahtera, berkeadilan dan berakhlak mulia sesuai dengan visi Kabupaten Sarolangun. Sedangkan yang menjadi tujuan kajian adalah :

1. Diperolehnya gambaran umum kondisi terkini dari

kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

2. Tersusunnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
3. Secara tidak langsung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri dan berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*).

Sasaran

Sasaran akhir yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi terkini mengenai fakta dan fenomena kemiskinan penduduk di Kabupaten Sarolangun.
2. Tersedianya dokumen **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sarolangun** yang dapat menjadi acuan arah dan kebijakan yang harus dicapai, dalam hal pendekatan, sasaran, konsolidasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun berdasarkan wilayah kecamatannya.

METODE PENELITIAN

Teori Kemiskinan

Kemiskinan Relatif dan Absolut

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan

ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu

membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Penyebab Kemiskinan

Todaro (2000), mengatakan bahwa ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki serta erat kaitannya dengan miskin atau tidak seseorang yaitu :

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar yaitu : sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan memunculkan keterbelakangan absolut. Atas dasar itulah bisa dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.
2. Jati diri yaitu menjadi manusia seutuhnya. Adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan

layak melakukan atau mengejar dan seterusnya. Jati diri tidak semata diukur dengan material, karena hal itu akan menghilangkan jati diri seseorang.

3. Kebebasan dari sikap menghamba yaitu kemampuan untuk memilih. Kebebasan disini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan.

Titik pandang ekonomi mengemukakan, kemiskinan dianggap merupakan masalah dengan alasan:

1. Kemiskinan merupakan cermin dari rendahnya permintaan aggregate, yang akan mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi.
2. Kemiskinan berkaitan dengan rasio kapital / tenaga kerja yang rendah yang selanjutnya mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah.
3. Kemiskinan sering kali mengakibatkan mislokasi sumber daya terutama tenaga kerja.

Metode pengukuran kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk atau rumah tangga miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan

(*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0,1,2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0),

Jika $\alpha = 1$, diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan / *Poverty Gap Index* (P_1),

Jika $\alpha = 2$, diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan / *Poverty Severity Index* (P_2).

Metode Analisis

Baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan metode analisis deskriptif analitik. Khusus untuk data primer, terlebih dahulu dilakukan pembobotan (scoring) terhadap item-item pengamatan dan pertanyaan. Dengan bantuan tabel-tabel tunggal dianalisis besaran, frekuensi dan persentase dari variabel-variabel yang diteliti dan diamati.

- Penelaahan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengamatan/obsevasi langsung ditabulasi, dipelajari serta ditelaah secara cermat melalui diskusi-diskusi diantara anggota tim penyusun berkaitan dengan karakteristik responden, kondisi kemiskinan responden dalam berbagai aspek saat kajian, penyebab-penyebab kemiskinan.
- Setelah berbagai data diperoleh lalu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok untuk kemudian dianalisis untuk menentukan permasalahan mendasar dengan mempertimbangkan data dari hasil kajian dan kebijakan yang sebelumnya sudah diterapkan.
- Permasalahan mendasar yang telah diperoleh dibahas kembali oleh tim Penyusun bersama dinas-dinas terkait untuk menentukan alternatif strategi dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang berkait dengan kewenangan, kapasitas dan dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penanggulangan Kemiskinan

3.2.1. Pendekatan

Berdasarkan karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Sarolangun, dapat dikemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi terutama disebabkan : (1) rendahnya kepemilikan asset (faktor produksi) seperti sawah, ladang atau tanah kering, hewan ternak, kendaraan roda dua (2) rendahnya kualitas sumberdaya manusia, (3) pekerjaan utama hanya sebagai buruh tani dan pekerjaannya tidak menentu serta tidak memiliki pekerjaan sampingan, (4) jam kerja yang relative rendah, (5) rendahnya pendapatan keluarga sehingga berakibat pada rendahnya pembentukan modal, (6) memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, (7) sebagian besar masih bergantung pada pemerintah dan orang lain, (8) tidak memiliki akses langsung terhadap sumber informasi baik televisi ataupun radio, (9) tidak memiliki akses terhadap sumber permodalan formal, (10) tidak memiliki MCK yang memadai, (11) sebagian besar KK adalah penduduk setempat/asli. Oleh karenanya pendekatan penanggulangannya harus dititikberatkan pada pendekatan berbasis ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Peningkatan kemampuan keluarga miskin terutama kepala keluarga, istri dan anak-anaknya yang sudah memasuki usia remaja melalui peningkatan keterampilan dan keahlian serta pengetahuan.
2. Peningkatan pendapatan melalui
3. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
4. Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil dan memfasilitasi akses permodalan;

Kelompok Program

Dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, maka program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan atas empat kelompok berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program. Keempat kelompok tersebut mengacu pada kelompok program penanggulangan kemiskinan secara nasional sebagai berikut:

1. Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Kelompok program-program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Secara terperinci, masing-masing kelompok program tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan sangat miskin. Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin dan miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi mereka yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

b. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan/pelestarian.
2. Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas
3. Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (*technical assistance*) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan dan kabupaten.

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah. Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin. Kelompok masyarakat tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan

potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. Dalam konteks ini, di Kabupaten Sarolangun sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin umumnya memiliki kemampuan secara fisik karena kepala rumah tangga yang secara rata-rata berada pada usia produktif. Kendala yang dihadapi hanyalah pada tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang relatif rendah, sehingga dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran agar mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.

c. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi

masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

d. Kelompok Program-Program Lainnya

Program-program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Kelompok program yang merupakan program umum yang direncanakan Kabupaten Sarolangun.

Program Spesifik dan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun

No	Kelompok Program	Kecamatan			
		I dan II	III	IV	V
I	Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial				
1	Bantuan tunai bersyarat pendidikan				
2	Bantuan tunai bersyarat kesehatan				
3	Bantuan pendidikan berupa beasiswa				
4	Penyediaan buku pelajaran dan modul bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin				
5	Bantuan perbaikan rumah (bedah rumah)				
II	Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan petani				
	Tanaman Pangan				
	Karet dan kelapa sawit				
	Kelapa, pinang, dan coklat				
2	Pembangunan dan perbaikan sistem pengairan dan rehabilitasi sumber-sumber air yang rusak				
3	Pemberian perbenihan unggul				
4	Pemberian bibit ikan unggul				

5	Penyuluhan pengelolaan usaha perikanan darat				
6	Perluasan jaringan pemasaran produksi dan perbaikan tata niaga hasil pertanian dan perkebunan				
7	Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan				
8	Pemberian bibit ternak kecil dan besar				
9	Pemberian bibit unggas				
10	Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan peternak				
III	Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil				
1	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
2	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro KUBE untuk memfasilitasi modal usaha bagi KUBE-KUBE				
3	Meningkatkan akses bantuan kredit dari pengusaha dan perbankan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil				
4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin				
5	Pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi usaha mikro dan kecil				
6	Pendampingan terhadap lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum				
7	Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro				
IV	Program Terkait Lainnya (Program Non-Kluster)				
1	Memperluas sarana dan prasarana air bersih				
2	Memperluas sarana dan prasana listrik				
3	Meningkatkan akses transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan bagi desa terisolir				
4	Perbaikan sarana-prasarana pasar-pasar desa dan kecamatan				
5	Peningkatan akses masyarakat miskin pada Balai Latihan Kerja (BLK)				
6	Peningkatan alokasi anggaran kesehatan kesehatan				
7	Peningkatan penempatan dokter dan bidan di desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, tertinggal dan terisolasi				
8	Perluasan jangkauan Puskesmas melalui Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, jaringan Puskesmas dan Pos Pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil				
9	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan terutama di wilayah perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan				
10	Perluasan jumlah dan sarana program keaksaraan fungsional				
11	Pengembangan pelatihan keterampilan hidup (life skill) melalui lembaga kursus bagi masyarakat miskin				
12	Penyediaan lahan/tanah untuk permukiman masyarakat miskin				
13	Pengembangan sistem subsidi perumahan bagi masyarakat miskin				

Keterangan :

I : Kecamatan Mandiangin

II : Kecamatan Pauh

III : Kecamatan Limun

IV : Kecamatan Air Hitam

V : Kecamatan Sarolangun

 Prioritas 1

 Prioritas 2

 Bukan prioritas

7.2.4. Strategi Baru (*New Strategy*)

Strategi ekstrim ini dimaksudkan agar penanganan masalah kemiskinan lebih tepat, cepat dan terintegrasi dengan baik. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan keluarga miskin di Kabupaten Sarolangun pada satu tempat/kawasan tertentu. Diberikan lahan untuk perumahan dan untuk bertani atau berkebun sesuai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan usaha peningkatan keterampilan, pembinaan, pelatihan, penempatan secara berkala beberapa motivator, guna merubah *mind set* dan *culture* serta pola pikir penduduk miskin. Kemudian SKPD terkait menyerang dari berbagai penjuru sesuai tupoksi

SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian capaian sasaran akan lebih tepat dan cepat. Tidak hanya pemerintah daerah yang akan lebih mudah dalam penanganannya, pihak lainpun seperti perguruan tinggi, swasta dan masyarakat umumnya akan lebih tertarik dan lebih mudah untuk dapat mendorong dan mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan.

Penempatan penduduk miskin di satu tempat diharapkan akan dapat memperbesar motivasi mereka untuk merobah nasibnya. Keberhasilan sebagian dari mereka akan menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk juga bisa berubah.

Kedudukan Program - Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi

Permasalahan kemiskinan, bukan permasalahan sederhana tetapi permasalahan yang multi kompleks yang harus ditangani secara holistik dan simultan terus menerus. Dalam

konteks tersebut, dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, Kabupaten Sarolangun harus bekerjasama secara baik dan terkoordinir dengan pemerintah pusat maupun Provinsi. Koordinasi dalam hal ini diperlukan dalam rangka menetapkan wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok sasaran yang sesuai dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pusat maupun provinsi tersebut.

a. Pelaksanaan

Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK Kabupaten Sarolangun bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.

Keanggotaan TKPK Kabupaten Sarolangun terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Ketua TKPK adalah Wakil Bupati Sarolangun. Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun.

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK diatur dengan Surat Keputusan Bupati. TKPK ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Selanjutnya, semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

b. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi kemiskinan, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/program secara obyektif dan sistematis. Pemantauan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan. Pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh kementerian/ lembaga non departemen terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, dan mengukur dampak kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) seperti lembaga swadaya masyarakat,

perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi dan media massa.

KESIMPULAN

Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang lebih bersifat multidimensional sehingga penanganan permasalahan ini harus pula bersifat komprehensif dan tidak temporer dengan melibatkan berbagai pihak, bukan saja pemerintah akan tetapi *stakeholder* seperti perusahaan swasta, lembaga pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain. Koordinasi dan sinergitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menyokong suksesnya pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sarolangun tahun 2013 merupakan dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan sudah menjadi keharusan untuk mendapat perhatian khusus seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Tujuan utama adanya dokumen SPKD ini, agar kontribusi nyata dari seluruh program dan kegiatan memiliki daya ungkit bagi tercapainya angka penurunan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlakuannya sama dengan dokumen-dokumen pembangunan daerah lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) Kabupaten Sarolangun tahun 2013 tidak hanya

menggambarkan kondisi terkini tentang kemiskinan di daerah ini, tetapi sekaligus juga mengevaluasi strategi, program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yakni kemiskinan yang disebabkan oleh factor ekonomi, social dan kultur. Program dan strategi dalam pengentasan kemiskinan selama ini hanya menyentuh faktor penyebab dari aspek ekonomi dan sosial (seperti pendekatan pendidikan dan kesehatan) dengan strategi *basic needs approach*, namun pendekatan dari sisi kultur belum dilakukan. Padahal untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sarolangun yang disebabkan oleh faktor *culture* memerlukan sebuah proses yang cukup lama untuk mengubahnya. Apalagi kemiskinan tersebut adalah budaya kemiskinan, dimana tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin yang disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Faktor kultur seperti ketidakinginan atau tidak ada kemauan untuk mengubah nasib keluar dari kemiskinan dari keluarga miskin menjadi hal sulit dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Oleh karenanya diperlukan strategi khusus atau kebijakan yang lebih *pro-poor*.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, tidak hanya pada besarnya persentase dan jumlah penduduk miskin (P0) tetapi juga

bermasalah pada tingkat kedalaman kemiskinan (P1) atau *Poverty Gap Index*, dimana rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan relative besar dengan nilai diatas satu dan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jambi, sedangkan keparahan kemiskinan (P2) (*Poverty Severity Index*) juga menunjukkan angka yang lebih besar dari rata-rata Provinsi Jambi yang menggambarkan tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemiskinan di Kabupaten Sarolangun memerlukan sebuah program pengentasan kemiskinan yang lebih menitikberatkan kepada proses dan mengusahakan agar *outcome* pengentasan kemiskinan merupakan fokus dari program pengentasan kemiskinan sehingga tidak hanya melihat dari jumlah angka kemiskinan yang berkurang tetapi juga melihat bagaimana penduduk miskin tidak kembali menjadi miskin. Sebaik apapun program dan strategi, jika tidak diikuti oleh pengawasan dan evaluasi yang baik tidak akan pernah tercapai sasaran yang sudah dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Setneg, 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Alcock, P. 1997. Understanding poverty. London: Macmillan Press.
- Bappenas-KPK. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta
- Baswir, R (1997. "Agenda Ekonomi Kerakyatan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS, 1999. Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS. Buku I, Seri Publikasi Susenas Mini 1999. Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Brodjonegoro, B. P. S. (2007). Pencapaian MDGs dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Depok: Panitia Lokakarya Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
- Chambers, Robert (1983), Rural Development : Putting the last First, Longman, London.
- Carney. (1998). Sustainable livelihood strategies. London: International Institute for Environment and Development.
- Clayton, B. D., David. D., & Olivier, D. (2000). Rural planning in the developing world with a special focus on natural resources: Lessons learned and potential contributions to sustainable livelihoods. London: International Institute for Environment and Development, and Department for International Development.
- Glueck, W F., & Jauch, L R. 1989. Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan (2 nd ed). Jakarta: Erlangga.
- Hariadi, B. 2003. Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis 2000. Bayu Media Publishing. Jakarta
- Harris-White, B. (2005). Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia. World Development 33:881-891.
- Henry Mintzberg, 1992. "Five Ps for Strategy" dalam The Strategy Process, H Mintzberg and JB Quinn eds., , Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs NJ.
- Ikhsan, M (1999. The Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana
- Johnson G dan Scholes K. 1998. Exploring Techniques Analysis and Evaluation in Strategic Management. Prentice Hall Europe. Harlow, Essex
- Kartasasmata, Ginanjar (1995), Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei 1995.
- Mubyarto, dkk, 1994, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Yogyakarta: Aditya Media
- Nanga, 2006. Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Bogor: Institut Pertanian Bogor

- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit. Grasindo. Jakarta
- Sayogyo, 1996; "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum pangan", Yogyakarta: Aditya Media
- Tjondronegoro, S. M. P., Soejono, I. & Hardjono, J. (1996). Indonemiskinesia. Dalam M.G. Quilibria (Editor), Rural poverty in developing Asia. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand. Manila: Published by Asian Development Bank.
- van Oostenbrugge, J. A. E, van Densen, W. L. T. & Machiels, M. A. M. (2004). How the uncertain outcomes associated with aquatic and land resource use affect livelihood strategies in coastal communities in the Central Moluccas, Indonesia. *Agricultural Systems* 82:57-91.
- World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.